

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Manajemen strategi organisasi yang dilakukan DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan mutu kader meliputi: Pengelolaan organisasi dengan perencanaan yang matang, tata kelola organisasi yang efektif, pelaksanaan yang baik, dan pengendalian organisasi yang cermat. Dengan strategi yang tepat, organisasi DPC PKB Kabupaten Cirebon tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan praktis dan politis, tetapi juga menjadi wadah pendidikan politik bagi para masyarakat dan kader tentang keterampilan berpolitik dan manajemen organisasi politik. Lebih dari itu, implementasi manajemen strategi organisasi dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, moralitas, dan kepartaian serta berkontribusi pada pembangunan IPM masyarakat secara umum. Dengan mengintegrasikan semua unsur kepengurusan ke dalam struktur organisasi partai secara menyeluruh dan melibatkan seluruh stakeholder terkait, DPC PKB Kabupaten Cirebon dapat memastikan kelangsungan dan keberhasilan visi-misi dan program mereka, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada organisasi secara keseluruhan.
2. Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan mutu kader yaitu melalui kampanye pengenalan partai baik melalui seminar partai politik, diskusi tentang partai politik serta melakukan pengkaderan. Sasaran pengkaderan DPC PKB Kabupaten Cirebon ini ditujukan bagi masyarakat yang sudah terorganisir maupun bagi yang belum terorganisir dari kelompok masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh partai dilapangan adalah kampanye dengan mengajak masyarakat dalam pengenalan Visi/Misi partai tersebut, Keberhasilan menarik minat masyarakat ditentukan oleh tingkat keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti pengkaderan. Saat ini sistem kaderisasi PKB telah dibangun secara berjenjang, terstruktur, dan sistematis sebagaimana yang tertuang pada pasal 89 AD/ART PKB. Kaderisasi berdasarkan

jenjangnya terdiri dari: kaderisasi tingkat loyalis, kaderisasi tingkat penggerak, dan kaderisasi tingkat pelopor.

3. Apatisme politik dan faktor kepentingan menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Cirebon, faktor penghambat lainnya termasuk lingkungan dan tingkat pendidikan. Lingkungan tempat tinggal menjadi faktor penghambat apabila tumbuh sikap kurang peduli terhadap perpolitikan yang ada serta bersikap apatis. Sementara itu terdapat faktor-faktor pendukung pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PKB yaitu kepemimpinan organisasi yang menjadi salah satu hal penting dalam manajemen organisasi dan pendidikan politik partai. Selain itu solidnya pengurus partai, sistem pengkaderan yang sistematis, dan juga relasi dengan masyarakat yang kuat ini menjadi faktor pendukung lainnya.

## **B. Saran**

1. Hendaknya jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Cirebon, mengadopsi strategi yang holistik dan terintegrasi. Perencanaan yang matang, organisasi yang efektif, pelaksanaan yang baik, dan pengendalian yang cermat menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan strategi organisasi politik. Unit-unit organisasi seperti organisasi sayap partai tidak hanya seharusnya memenuhi kebutuhan praktis dan politis, tetapi juga berfungsi sebagai wadah pendidikan politik tentang nilai-nilai partai dan manajemen organisasi politik. Pengelolaan organisasi harus senantiasa dipandu oleh nilai-nilai Islam dan moralitas yang baik, serta memberikan kontribusi positif pada pembangunan manusia pada masyarakat sekitar. Integrasi organisasi underbow ke dalam struktur organisasi DPC secara menyeluruh akan menambah keberhasilan visi-misi mereka.
2. Hendaknya selain merekrut anggota yang baru para pengurus DPC terlebih dahulu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab utamanya dengan melaksanakan kewajiban pendidikan politik berdasarkan tingkatan (kaderisasi) sebagaimana yang sudah dijelaskan pada AD/ART partai. Jika

hal ini diperhatikan maka akan berdampak positif pada kualitas pendidikan politik partai.

3. Hendaknya para pengurus diberikan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Pimpinan organisasi partai juga harus memastikan bahwa para pengurus memiliki keseimbangan antara fokus profit pada organisasi dan komitmen terhadap nilai kepartaian, serta memastikan bahwa pengurus lain tidak mengganggu kualitas politik partai yang diperjelas melalui visi-misi partai.

